



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 108 /KUM/2025

TENTANG

DAFTAR DATA PRIORITAS KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, diperlukan penetapan data prioritas sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 mengenai Data Statistik Sektorial Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG DAFTAR DATA PRIORITAS KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Data Prioritas Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat Data Prioritas Statistik.

KETIGA : Data Prioritas Statistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada:
a. Indikator Kinerja Utama Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024-2026;
b. Indikator Kinerja Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2024;
c. Indikator Standar Pelayanan Minimal tahun 2024;
d. Indikator *Sustainable Development Goals* tahun 2024; dan
e. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

KEEMPAT : Data Prioritas Kabupaten banjar Tahun 2024 digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Februari 2025
BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ /KUM/2025
TENTANG
DATA PRIORITAS KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2024

DAFTAR DATA PRIORITAS KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
2.	Rasio Pengawas Dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
3.	Pertumbuhan Proporsi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Formal Dengan Kualifikasi S1 / D Iv	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
4.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
5.	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Angka Partisipasi Sekolah)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
6.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
7.	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar Berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
8.	Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar Berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
9.	Rata-Rata Kompetensi Numerasi Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
10.	Rata-Rata Kompetensi Literasi Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
11.	Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pendidikan Kesenjangan, Keaksaraan Dan Kecakapan Hidup	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
12.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
13.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
14.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Angka Partisipasi Sekolah)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
15.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan (Angka Partisipasi Sekolah)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
16.	Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
17.	Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
18.	Iklim Kebinekaan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
19.	Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
20.	Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
21.	Iklim Keamanan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
22.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
23.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
24.	Sekolah Dasar (7-12 Tahun)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
25.	Sekolah Menengah Pertama (13-15 Tahun)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
26.	Pendidikan Kesenjangan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
27.	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
28.	Apk Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Anak Usia Dini)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
29.	Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
30.	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
31.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
32.	Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
33.	Angka Kelulusan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
34.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Sederajat	Dinas Pendidikan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Banjar Tahun 2021-2026
35.	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
36.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri Dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
37.	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
38.	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
39.	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri Dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
40.	Jumlah Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri Dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
41.	Jumlah Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-Iv) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Dan Atau Psikologi Dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
42.	Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-Iv Atau S1, Sertifikat Pendidik Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Untuk Pendidikan Anak Usia Dini Formal Atau Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal Dari Lembaga Pemerintah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
43.	Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri terakreditasi	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
44.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
45.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
46.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
47.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
48.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
49.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
50.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
51.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
52.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
53.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
54.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
55.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
56.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana 8S1) dan sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
57.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
58.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
59.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
60.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
61.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
62.	Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri terakreditasi	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
63.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
64.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
65.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
66.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
67.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
68.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
69.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
70.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
71.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
72.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
73.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
74.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
75.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana 8S1) dan sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
76.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
77.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
78.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
79.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas / sederajat	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
80.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas / sederajat	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
81.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
82.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
83.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
84.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
85.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
86.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
87.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
88.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
89.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
90.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
91.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
92.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
93.	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
94.	Penurunan jumlah kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
95.	Jumlah Penurunan Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
96.	Persentase posyandu aktif	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
97.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
98.	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
99.	Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
100.	Presentase rumah sakit yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
101.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
102.	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
103.	Persentase Capaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
104.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
105.	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
106.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
107.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
108.	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
109.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
110.	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
111.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
112.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
113.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
114.	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
115.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
116.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
117.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
118.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
119.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
120.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
121.	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
122.	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
123.	Persentase FKTP terakreditasi	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
124.	Jumlah Puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
125.	Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
126.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
127.	Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
128.	Persentase Sarana Produksi U MOT	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
129.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
130.	Penemuan Kasus TBC	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
131.	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
132.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
133.	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
134.	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
135.	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
136.	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
137.	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
138.	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
139.	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
140.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
141.	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
142.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
143.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
144.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
145.	Pelayanan kesehatan balita.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
146.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
147.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
148.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
149.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
150.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
151.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
152.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
153.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
154.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
155.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
156.		Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
157.		Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
158.	Jumlah Posyandu	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
159.	Jumlah Balita	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
160.	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
161.	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
162.	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
163.	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
164.	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
165.	Rasio perawat per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
166.	Rasio bidan per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
167.	Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
168.	Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
169.	Rasio tenaga teknisi medis per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
170.	Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banjar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
171.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
172.	Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
173.	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
174.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
175.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
176.	Perkembangan kepesertaan PBI APBD	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
177.	Angka Non Polio AFP per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banjar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
178.	Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA (Succes Rate) di Kabupaten Banjar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
179.	Jumlah Pneumonia Pada Balita yang Ditemukan dan Ditangani di Kabupaten Banjar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
180.	Kasus HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
181.	kasus AIDS	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
182.	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
183.	Jumlah Kasus Diare Yang Ditangani	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
184.	Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1.000 Penduduk di Kabupaten Banjar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
185.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
186.	Persentase keluarga yang memenuhi 12 indikator kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
187.	Persentase Keluarga yang Memenuhi 12 Indikator Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
188.	Angka penemuan kasus penyakit menular	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
189.	Angka Penemuan Kasus Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
190.	Persentase kecamatan yang melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
191.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
192.	Mempertahankan prevalensi obesitas	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
193.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
194.	Persentase kecamatan yang melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
195.	Persentase pencapaian Indikator STANDAR PELAYANAN MINIMAL di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
196.	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
197.	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
198.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
199.	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
200.	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
201.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
202.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
203.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
204.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
205.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
206.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
207.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
208.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
209.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
210.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
211.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
212.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
213.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
214.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
215.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
216.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
217.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
218.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
219.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
220.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
221.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
222.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
223.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
224.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
225.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
226.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
227.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
228.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
229.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
230.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
231.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
232.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
233.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
234.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
235.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
236.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
237.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
238.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
239.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
240.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
241.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
242.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
243.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
244.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
245.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
246.	Prevalensi Obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	Dinas Kesehatan		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
247.	Proporsi Perempuan pernah kawin umur 14-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (b) difasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
248.	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
249.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
250.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahsipilunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
251.	Persentase angka BABS di tempat terbuka	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
252.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
253.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
254.		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
255.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
256.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
257.	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
258.	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
259.	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
260.	Tambahan Debit Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
261.	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
262.	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
263.	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
264.	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
265.	Penetapan RDTR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
266.	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
267.	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
268.	Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
269.	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Alih Fungsi Lahan Sawah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
270.	Luas genangan kabupaten banjar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
271.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
272.	Persentase timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
273.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
274.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
275.	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
276.	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
277.	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
278.	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
279.	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
280.	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
281.	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
282.	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
283.	Penetapan RTRW	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
284.	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
285.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
286.	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
287.	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
288.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
289.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
290.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
291.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
292.	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
293.	Konektivitas Wilayah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
294.	Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
295.	Penyelesaian kasus tanah negara atau yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Banjar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
296.		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
297.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
298.	Ketaatan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
299.	Luas Wilayah Produktif	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
300.	Nilai STANDAR PELAYANAN MINIMAL tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL(%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
301.	Persentase Prasarana Konektivitas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
302.	Indeks Jaringan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
303.	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
304.	Ketaatan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
305.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
306.	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
307.	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
308.	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
309.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
310.	Persentase Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
311.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
312.	Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
313.	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
314.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaraan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
315.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
316.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
317.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
318.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
319.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
320.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
321.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
322.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
323.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
324.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD -S akses aman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
325.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
326.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
327.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
328.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
329.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
330.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
331.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
332.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
333.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
334.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
335.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
336.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
337.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
338.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
339.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
340.	Panjang jalan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
341.	Panjang jembatan yg dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
342.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
343.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Ruang Dan Pertanahan		
344.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
345.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
346.	Panjang jalan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
347.	Panjang jembatan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
348.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
349.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
350.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
351.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
352.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
353.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
354.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
355.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
356.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
357.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
358.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan sertifikat operator teknisi/analisis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
359.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
360.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
361.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
362.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
363.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
364.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
365.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
366.	Jumlah usaha perseorangan memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
367.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
368.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
369.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
370.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
371.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
372.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
373.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
374.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
375.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
376.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
377.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
378.	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
379.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
380.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
381.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
382.	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
383.	SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
384.	SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
385.	Dokumen izin membuka tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
386.	Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
387.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
388.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
389.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
390.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
391.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
392.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
393.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
394.	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
395.	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
396.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
397.	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
398.	Persentase Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
399.	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
400.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
401.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
402.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
403.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
404.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
405.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
406.	Angka Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
407.	Kasus pelanggaran perda bernuansa kearifan lokal	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
408.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
409.	Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
410.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
411.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
412.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
413.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
414.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
415.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
416.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
417.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
418.	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
419.	Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
420.	Jumlah personil TRC tingkat kabupaten yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
421.	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
422.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
423.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
424.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
425.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
426.	Pelayanan informasi rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
427.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
428.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
429.	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
430.	Persentase Bencana yang ditanggulangi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
431.	Indeks Ketahanan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
432.	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
433.	Persentase desa yang mendapat fasilitasi pengurangan risiko bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
434.	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
435.	Implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
436.	Persentase implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
437.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
438.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
439.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
440.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
441.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
442.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
443.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
444.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
445.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
446.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
447.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
448.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
449.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
450.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
451.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
452.	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
453.	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
454.	Terpenuhinya capaian mutu layanan STANDAR PELAYANAN MINIMAL sub urusan trantibum	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
455.	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
456.	Terpenuhinya Kebutuhan STANDAR PELAYANAN MINIMAL sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
457.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
458.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
459.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
460.	Tersedianya(Jumlah) pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
461.	Tersedianya (Jumlah) aparatur DAMKAR selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
462.	(JUmlah)Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
463.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
464.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
465.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
466.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
467.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
468.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
469.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
470.	Jam buka pelayanan gawat darurat	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
471.	Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
472.	Kesediaan tim penanggulangan bencana	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
473.	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
474.	Kepuasan pelanggan di gawat darurat	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
475.	Kematian pasien $\leq$ 24 jam	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
476.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
477.	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
478.	Ketersediaan pelayanan di rawat jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
479.	Jam buka pelayanan Rawat Jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
480.	Waktu tunggu di rawat jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
481.	Kepuasan pelanggan Rawat Jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
482.	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
483.	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
484.	Pemberi pelayanan rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
485.	Dokter penanggungjawab rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
486.	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
487.	Jam visite dokter spesialis	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
488.	Kejadian Infeksi pasca operasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
489.	Kejadian infeksi nasokomial	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
490.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kecacatan/kematian	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
491.	Kematian pasien > 48 jam	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
492.	Kejadian pulang paksa	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
493.	Kepuasan pelanggan rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
494.	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB (Rawat Inap)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
495.	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit (Rawat Inap)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
496.	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
497.	Kejadian kematian ibu karena persalinan (Perdarahan ≤ 1 %)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
498.	Kejadian kematian ibu karena persalinan (Pre_eklamsia ≤ 30 %)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
499.	Kejadian kematian ibu karena persalinan (Sepsis $\leq 0,2$ %)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
500.	Pemberi pelayanan persalinan normal	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
501.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
502.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
503.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
504.	Pertolongan persalinan melalui sectio cesarea	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
505.	Persentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.anastesi dan dr.umum terlatih	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
506.	Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
507.	Kepuasan Pelanggan (Persalinan dan Perinatologi)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
508.	waktu tunggu operasi elektif	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
509.	Kejadian Kematian di meja operasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
510.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
511.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
512.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
513.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
514.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan, endotracheal tube	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
515.	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
516.	Pemberi pelayanan Unit Intensif (Dokter Sp Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
517.	Pemberi pelayanan Unit Intensif (100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
518.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
519.	Pelaksana ekspertisi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
520.	Kejadian Kegagalan pelayanan rontgen	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
521.	Kepuasan pelanggan untuk instalasi radiologi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
522.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
523.	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
524.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
525.	Kepuasan Pelanggan laboratorium	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
526.	Kejadian Drop Out Pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
527.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
528.	Kepuasan pelanggan di rehab medik	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
529.	Waktu tunggu Obat jadi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
530.	Waktu tunggu Obat Racikan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
531.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
532.	Kepuasan pelanggan di instalasi farmasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
533.	Penulisan resep sesuai formularium	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
534.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
535.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
536.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Diet	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
537.	Kebutuhan darah pasien	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
538.	Kejadian reaksi transfusi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
539.	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
540.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
541.	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
542.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
543.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
544.	Baku mutu limbah cair	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
545.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
546.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
547.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
548.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
549.	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
550.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
551.	Cost recovery	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
552.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
553.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
554.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
555.	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
556.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
557.	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
558.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
559.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
560.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
561.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
562.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
563.	Adanya anggota tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang terlatih	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
564.	Tersedia APD disetiap Instalasi/Departemen	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
565.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial (Health Care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter)	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
566.	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
567.	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
568.	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
569.	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
570.	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
571.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
572.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
573.	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
574.	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
575.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
576.	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
577.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
578.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
579.	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
580.	Jumlah Timbunan di TPA Cahaya Kencana	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
581.	Jumlah Timbunan yang masuk ke TPA Cahaya Kencana	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
582.	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
583.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
584.	Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
585.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
586.	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
587.	Jumlah Perusahaan yang bekerja sama dengan BLUD Intan Hijau dan juga masyarakat wilayah sekitar kabupaten banjar	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
588.	Jumlah Perusahaan yang bekerja sama dengan BLUD Intan Hijau dan juga masyarakat wilayah sekitar kabupaten banjar	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
589.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
590.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diintervensi	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
591.	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2027
592.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2028
593.	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
594.	Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
595.	Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
596.	Persentase Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi yang Telah Dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
597.	Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
598.	Persentase Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban dalam Ijin Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
599.	Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
600.	Persentase Perizinan yang Difasilitasi	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan	Tahunan	Indikator Sustainable

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Development Goals
601.	Persentase rehabilitasi rumah bagi korban Bencana	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
602.		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
603.	Persentase penanganan sampah	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
604.	Persentase Sampah yang Terkelola di TPA	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
605.	Jumlah rumah yang melakukan pilahan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
606.	1. Rasio rumah dan KK, 2. Jumlah Angkutan yang Masuk TPA Cahaya Kencana	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
607.	Jumlah rumah pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
608.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
609.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
610.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
611.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
612.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
613.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
614.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
615.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
616.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
617.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
618.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
619.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
620.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
621.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
622.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
623.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
624.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
625.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
626.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
627.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
628.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
629.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
630.	Terlaksanakannya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
631.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
632.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
633.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
634.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
635.	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
636.	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
	berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)			
637.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
638.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
639.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
640.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
641.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
642.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
643.	Persentase ARG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
644.	Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
645.	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
646.	Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
647.	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
648.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
649.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
650.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
651.	Jumlah Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
652.	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
653.	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
654.	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
655.	Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
656.	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
657.	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
658.	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
659.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
660.	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
661.	Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
662.	Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
663.	Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
664.	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
665.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
666.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
667.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
668.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
669.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
670.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
671.	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
672.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
673.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
674.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
675.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
676.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
677.	Jumlah pekerja sosial profesionalprofessional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
678.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator STANDAR PELAYANAN MINIMAL)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
679.	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
680.	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
681.	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
682.	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
683.	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
684.	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
685.	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
686.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
687.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
688.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
689.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
690.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
691.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
692.	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
693.	Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
694.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
695.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
696.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
697.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
698.	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
699.	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
700.	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
701.	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
702.	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
703.	Jumlah KPM yang Meningkatkan Pendapatannya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
704.	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
705.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
706.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
707.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
708.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
709.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
710.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
711.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
712.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
713.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
714.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
715.	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
716.	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
717.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitas Sosial di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
718.	Jumlah Warga Negara Gepeng yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
719.	jumlah korban bencana yang mendapatkan dukungan psikososial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
720.	jumlah korban bencana yang mendapatkan penyediaan sandang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
721.	jumlah korban bencana yang mendapatkan penyediaan sandang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
722.	jumlah korban bencana yang mendapatkan permakanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
723.		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
724.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Standar Pelayanan Minimal
725.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2026
726.		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
727.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional(%)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
728.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja(%)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
729.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
730.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
731.	Kasus kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana		Banjar Tahun 2021-2026
732.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
733.	Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
734.	Laju pertumbuhan penduduk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
735.	TFR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
736.	Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
737.	Peserta KB aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
738.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, (b) pemerintah daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
739.	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
740.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
741.	Persentase data kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi dengan tepat dan akurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
742.	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
743.	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
744.	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
745.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
746.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
747.	Rasio Gini.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
748.	Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
749.	Persentase Anak/Orang Terlantar Luar Panti yang Tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
750.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilatih PUG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
751.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
752.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
753.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
754.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
755.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
756.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD Kab/Kota)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
757.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
758.	Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
759.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
760.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
761.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
762.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
763.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
764.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
765.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
766.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
767.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
768.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
769.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
770.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
771.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
772.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
773.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
774.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
775.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
776.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
777.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
778.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
779.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
780.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
781.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
782.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
783.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
784.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
785.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
786.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
787.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
788.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
789.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
790.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
791.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
792.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
793.	Jumlah pekerja sosial profesional /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
794.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator STANDAR PELAYANAN MINIMAL)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
795.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
796.	Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perdakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
797.	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
798.	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
799.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
800.	Jumlah stakeholder / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
801.	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
802.	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
803.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
804.	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
805.	Persnetase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesetaan rendah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
806.	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
807.	TFR (angka kelahiran total)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
808.	Persentase pemakaian kotrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
809.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
810.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilatih PUG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
811.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
812.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
813.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
814.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
815.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
816.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD Kab/Kota)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
817.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
818.	Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
819.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Penduduk, Dan Keluarga Berencana		
820.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
821.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
822.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
823.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
824.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
825.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
826.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
827.	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
828.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
829.	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
830.	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
831.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
832.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
833.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
834.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
835.	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
836.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
837.	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
838.	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
839.	Penurunan sengketa industrial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2038
840.	Besaran para pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2039
841.	Persentase penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan SMP Kebawah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2040
842.	Persentase penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan SMA Kebawah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2041
843.	Pencari Kerja yang terdaftar	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2042
844.	Pencari Kerja ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Rpjmd Kab Banjar Tahun 2021 - 2043
845.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ikut BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
846.	Persentase Sengketa Industrial yang Diselesaikan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
847.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
848.	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
849.	Persentase Peningkatan Peluang Kerja Baru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
850.	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
851.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
852.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
853.	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
854.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
855.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
856.	Persentase LPK yang terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
857.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
858.	Jumlah pengangguran yang dilatih	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
859.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
860.	Persentase penyerapan lulusan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
861.	Lulusan bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
862.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
863.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
864.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
865.	Data tingkat produktivitas	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
866.	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
867.	Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
868.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
869.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
870.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
871.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
872.	Jumlah mogok kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
873.	Jumlah penutupan perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
874.	Jumlah perselisihan kepentingan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
875.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
876.	Jumlah perselisihan PHK	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
877.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
878.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
879.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
880.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
881.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
882.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
883.	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
884.	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
885.	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
886.	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKSD) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
887.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
888.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
889.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
890.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
891.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
892.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
893.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
894.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
895.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
896.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
897.	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
898.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
899.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
900.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
901.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
902.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
903.	Persentase daerah rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
904.	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
905.		Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
906.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
907.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
908.	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
909.	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
910.	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
911.	Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
912.	Operasi kapal/speedboat pengawas	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
913.	Angka Konsumsi Ikan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
914.	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
915.	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
916.	Skor Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
917.	Ketersediaan Pangan Utama (beras) Ton	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
918.	Ketersediaan Energi Per Kapita	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
919.	Ketersediaan Protein Per Kapita	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
920.	Konsumsi Rumah Tangga (ton)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
921.	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
922.	Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
923.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
924.	Tersedia infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
925.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
926.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
927.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
928.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
929.	Tertanganinya kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
930.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
931.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
932.	Persentasae ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
933.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
934.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
935.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
936.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
937.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
938.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
939.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
940.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
941.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
942.	Pemanfaatan data kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Perencanaan Pembangunan
943.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
944.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
945.	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
946.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
947.	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
948.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
949.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Lengkap	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
950.	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
951.	Cakupan Kepemilikan KTP-el	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
952.	Cakupan Kepemilikan KK	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
953.	Cakupan Kepemilikan KIA	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
954.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
955.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
956.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
957.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
958.	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
959.	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
960.	Penerbitan akta perkawinan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
961.	Penerbitan akta perceraian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
962.	Penerbitan akta kematian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
963.	Penyajian data kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
964.	Perekaman KTP Elektronik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
965.	Persentase anak usi 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
966.	Kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
967.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
968.	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
969.	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
970.	Jumlah pedoman/kebijakan/SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan yang disusun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
971.	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
972.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
973.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
974.	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
975.	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
976.	Indeks Capaian Revolusi Mental	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
977.	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
978.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
979.	Jumlah penduduk menurut kelompok umur	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
980.	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
981.	Jumlah Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
982.	Jumlah Desa Berkembang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
983.	Jumlah Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
984.	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
985.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
986.	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
987.	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
988.	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
989.	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
990.	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
991.	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
992.	Persentase Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
993.	Persentase Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
994.	Persentase Desa Berkembang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
995.	Persentase Penurunan Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
996.	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
997.	Persentase BUM Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
998.	Status Perkembangan Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
999.	Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1000.	Berkembang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1001.	Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1002.	Sangat Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1003.	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan bumdesa dan lembaga kerjasama antar desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1004.	Jumlah Desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1005.	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1006.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1007.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1008.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1009.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1010.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1011.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1012.	Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1013.	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1014.	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1015.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1016.	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1017.	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1018.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1019.	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1020.	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1021.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1022.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1023.	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1024.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1025.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1026.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1027.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1028.	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1029.	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1030.	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1031.	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1032.	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1033.	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1034.	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1035.	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1036.	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1037.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1038.	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1039.	Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1040.	Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas pemerintah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1041.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1042.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1043.	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1044.	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1045.	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1046.	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1047.	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1048.	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1049.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1050.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1051.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1052.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1053.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1054.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1055.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1056.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1057.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1058.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1059.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1060.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1061.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1062.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1063.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1064.	Persentase ASN pengelola TIK yang bersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1065.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1066.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1067.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1068.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1069.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1070.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1071.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1072.	Tersedianya buku profil daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1073.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1074.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1075.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1076.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1077.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1078.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1079.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1080.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1081.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1082.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1083.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1084.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1085.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1086.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1087.	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1088.	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1089.	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1090.	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1091.	Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1092.	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1093.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1094.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1095.	Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1096.	Ketersediaan prasarana perhubungan yang memiliki kondisi baik	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1097.	Ketaatan dalam berlalu lintas	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1098.	Persentase kendaraan wajib uji yang lolos dalam PKB	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1099.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1100.	Pemasangan rambu-rambu	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1101.	Ketersediaan rambu yang layak	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1102.	Jumlah uji kir angkutan umum	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Banjar Tahun 2021-2026
1103.	Angkutan umum yang beroperasi	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1104.	Angkutan umum yang masuk ke terminal	Dinas Perhubungan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1105.	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1106.	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1107.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe c	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1108.	terlaksananya pelayanan uji berkala	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1109.	Penetapan tarif angkutan orang antar Kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1110.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1111.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1112.	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1113.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1114.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1115.	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1116.	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1117.	Pertumbuhan Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1118.	Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1119.	Pertumbuhan Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1120.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1121.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1122.	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1123.	Tertib Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1124.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1125.	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Perdagangan, Dan Perindustrian		
1126.	Inflasi Pangan Bergejolak	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1127.	Pertumbuhan implementasi SRG (Sistem Resi Gudang)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1128.	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1129.	pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1130.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1131.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1132.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1133.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1134.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1135.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1136.	Persentase koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1137.	Persentase usaha mikro yang memiliki NIB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1138.	Ekspor Barang Jasa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1139.	Ekspor Bersih Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1140.	Impor Barang Jasa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1141.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1142.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1143.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1144.	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1145.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Tahunan	Indikator Sustainable

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian		Development Goals
1146.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1147.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1148.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1149.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1150.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1151.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1152.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1153.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1154.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1155.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1156.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1157.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1158.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1159.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1160.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1161.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1162.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1163.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1164.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1165.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1166.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1167.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1168.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1169.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1170.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1171.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1172.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
	pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Perdagangan, Dan Perindustrian		
1173.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1174.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1175.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1176.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1177.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1178.	Persentase penerbitan TDG (Tanda Daftar Gudang)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1179.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1180.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1181.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1182.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1183.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1184.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1185.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1186.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1187.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1188.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
		Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian		
1189.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1190.	Persentase kesesuaian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1191.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1192.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1193.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1194.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1195.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1196.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1197.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1198.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1199.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1200.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1201.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1202.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1203.	Peningkatan realisasi nilai investasi	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1204.	Pertumbuhan investor	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1205.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama)	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1206.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1207.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1208.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1209.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1210.	Kegiatan pameran penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1211.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1212.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1213.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1214.	Laporan realisasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1215.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1216.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1217.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1218.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1219.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1220.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1221.	Rasio PDB Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1222.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1223.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1224.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1225.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1226.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1227.	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1228.	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1229.	Jumlah Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatda	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1230.	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Kab/Kota	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1231.	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1232.	Persentase Wirausahawan Muda ditingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1233.	Jumah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1234.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1235.	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1236.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1237.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1238.	Angka Pengunjung Wisata (orang)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1239.	Jumlah budaya benda yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1240.	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1241.	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Banjar Tahun 2021-2026
1242.	jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan,kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1243.	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1244.	Jumlah Dokumen hasil peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1245.	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1246.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1247.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1248.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1249.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1250.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1251.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1252.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1253.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1254.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1255.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1256.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1257.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1258.	Tingkat hunian akomodasi	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1259.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1260.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1261.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1262.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1263.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1264.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1265.	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1266.	Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kabupaten keluar Kabupaten dengan dukungan data	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1267.	Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1268.	Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1269.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1270.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1271.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1272.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1273.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1274.	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1275.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1276.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1277.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1278.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1279.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1280.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1281.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1282.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1283.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1284.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1285.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1286.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1287.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1288.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1289.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1290.	Jumlah Wirausaha yang dilatih	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1291.	Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1292.	Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1293.	Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandardisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1294.	Jumlah atlet talenta muda	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1295.	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1296.	Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1297.	Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1298.	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1299.	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (persen)	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1300.	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1301.	Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1302.	Jumlah pendukungan/fasilitasi pada pelaku ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1303.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1304.	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1305.	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1306.	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1307.	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1308.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1309.	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1310.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1311.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1312.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1313.	Tingkat Kegemaran Membaca	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1314.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1315.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1316.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1317.	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1318.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1319.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1320.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1321.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1322.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1323.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1324.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1325.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1326.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1327.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1328.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1329.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1330.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1331.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1332.	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1333.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1334.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1335.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1336.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1337.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1338.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1339.	Jumlah Pojok Baca Digital do Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1340.	Jumlah Peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1341.	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1342.	Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1343.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1344.	Persentase penyelesaian SPP STANDAR PELAYANAN MINIMAL Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1345.	Persentase penyelesaian SPP STANDAR PELAYANAN MINIMAL Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1346.	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1347.	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1348.	Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1349.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1350.	Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1351.	Realisasi PAD (Rp)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1352.	Persentase Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1353.	Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1354.	Persentase belanja Pendidikan 20%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Banjar Tahun 2021-2026
1355.	Persentase belanja Kesehatan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1356.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1357.	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1358.	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1359.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1360.	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1361.	Persentase Aset Daerah yang Bernilai Wajar dan Baik	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1362.	Jumlah PAD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1363.	Jumlah Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1364.	Jumlah Belanja Daerah Tanpa Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1365.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1366.	Rasio PAD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1367.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1368.	Opini Laporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1369.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1370.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1371.	Assets Management	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1372.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1373.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1374.	Informasi tentang Sumber Data yang Tersedia untuk Pelayanan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1375.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1376.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1377.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1378.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1379.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1380.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1381.	Persentase Rencana Anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1382.	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1383.	Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1384.	Jumlah anggaran mandatory spending sesuai amanat UU No. 1/2022 tentang HKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1385.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1386.	Asia Power Index (Military Capability)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2045
1387.	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1388.	Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Bulanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1389.	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1390.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Tahunan	Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2020-2024
1391.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1392.	Produktivitas Padi (kwintal/hektar)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1393.	Produktivitas Jagung	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1394.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai dan bawang merah)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1395.	Persentase peningkatan Produktivitas Perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1396.	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1397.	Jumlah Produksi Susu	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1398.	Jumlah Produksi Telur	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1399.	Rasio Luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1400.	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1401.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1402.	Jumlah Produksi Jagung	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1403.	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1404.	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1405.	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1406.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1407.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1408.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1409.	Jumlah Produksi Padi	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1410.	Jumlah Produksi Kedelai	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Perencanaan Pembangunan
1411.	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1412.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1413.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1414.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1415.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1416.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1417.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1418.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1419.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1420.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Dinas Pertanian	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1421.	Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan	Dinas Pertanian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1422.	Produksi Padi (ton)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1423.	Produktivitas Padi (kwintal/hektar)	Dinas Pertanian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1424.	Pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan	Dinas Pertanian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1425.	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Dinas Pertanian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1426.	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Dinas Pertanian	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1427.	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1428.	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1429.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1430.	PDB per kapita	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1431.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1432.	Prasarana pertanian yang digunakan	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1433.	Penerbitan izin usaha pertanian	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1434.	Persentase prasarana yang digunakan	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1435.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1436.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1437.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1438.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Pertanian	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1439.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1440.	Persentase Pelanggaran Pegawai	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1441.	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1442.	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1443.	Indeks Integritas	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1444.	IPAK	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1445.	IEPK	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1446.	Persentase instansi pemerintah dengan skor SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH >= B (60-70)	Inspektorat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1447.	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	Inspektorat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1448.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1449.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1450.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Inspektorat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1451.	Opini Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1452.	Indeks Integritas Instansi	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1453.	Indeks Prilaku Anti Korupsi	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1454.	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1455.	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	Inspektorat Daerah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1456.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1457.	IKM Kabupaten	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1458.	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1459.	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1460.	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1461.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1462.	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1463.	Indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI)	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1464.	IKM Sekretariat Daerah Kab. Banjar	Sekretariat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1465.	Persentase PD SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH bernilai baik	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1466.	Rata-rata IKM Kecamatan	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1467.	Persentase BUMD yang sehat	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1468.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tepat waktu	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1469.	Persentase PD Pengelolaan RB Bernilai Baik	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1470.	Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1471.	Jumlah SKPD yang Menyampaikan dan Mengumumkan RUP tepat waktu	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1472.	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1473.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1474.	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) >=B	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1475.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1476.	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1477.	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1478.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1479.	Persentase Jumlah Total Rup Yang Terinput Pada Aplikasi Sirup Oleh Masing-Masing Skpd	Sekretariat Daerah	Tahunan	Indikator Kinerja Kunci
1480.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1481.	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1482.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1483.	Dokumen RPJPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1484.	Dokumen RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1485.	Dokumen RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1486.	Rtrw	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1487.	Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1488.	Persentase Capaian Indikator Rpjmd	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1489.	Nilai Rata-Rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Skpd Lingkup Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1490.	Nilai Rata-Rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Skpd Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1491.	Nilai Rata-Rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Skpd Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1492.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
1493.	Persentase Anggaran Responsif Gender	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1494.	Jumlah Nilai Investasi Proyek KPBU yang telah ditandatangani	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1495.	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1496.	Jumlah Proyek yang masuk dalam daftar Rencana Proyek KPBU dengan status siap ditawarkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1497.	Jumlah Proyek yang sedang dalam proses Prakualifikasi pada tahun berjalan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1498.	Jumlah Inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan public dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1499.	Jumlah Produk Hukum Yang Dibahas Dan Mednapatkan Persetujuan Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1500.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1501.	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1502.	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1503.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1504.	Persentase Jumlah Total Rup Yang Terinput Pada Aplikasi Sirup Oleh Masing-Masing Skpd	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1505.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
1506.	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
				Banjar Tahun 2021-2026
1507.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1508.	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1509.	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
1510.	Dokumen RKPD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1511.	RtRw	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1512.	Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1513.	Persentase Capaian Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1514.	Nilai Rata-Rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1515.	Nilai Rata-Rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals
1516.	Nilai Rata-Rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tahunan	Indikator Sustainable Development Goals

NO	INDIKATOR	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	SUMBER DATA
1517.	Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1518.	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1519.	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1520.	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
1521.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Triwulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
1522.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR